

Vol. 18, No. 1, Januari-Maret 2023

GITA SANG SURYA

Media Diskursus Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan

Pengantar Filsafat Politik ... 2

Keadilan Karl Marx:
Tilikan Rodney G. Peffer ... 20

Leonardo Boff:
Krisis Peradaban dan Etika Baru ... 25

Kehidupan dalam Society 5.0:
Dilema dalam Mewujudkan
Keadilan dan Kesenjangan ... 33

Makna Positif Kematian ... 47

Jalan Pertobatan St. Fransiskus Assisi ... 49

Johann Baptist Metz:
Tangisan dan Mistisisme Penderitaan ... 54

Kemampuan RAAT
(Resilience, Attention, Adaptation, Transparency)
untuk Menghadapi Era Teknologi Mesin Pintar ... 60

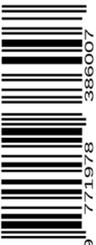
Tinjauan Buku "A Free and Fraternal Economy:
The Franciscan Perspective" ... 73

Tinjauan Buku "Krishnamurti 100 Years" ... 76



MADAH PERSAUDARAAN SEMESTA

ISSN 1978-3868



9 771978 386007

GITA SANG SURYA

Media Diskursus Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan

Diterbitkan oleh JPIC OFM Provinsi St.
Michael Malaikat Agung Indonesia.

Penanggung Jawab: Ketua Komisi JPIC OFM Indonesia. **Pemimpin Redaksi:** Yansianus Fridus Derong OFM.
Redaktur Pelaksana: Yohanes Wahyu Prasetyo OFM. **Redaksi:** Antonius Nugroho Bimo Prakoso OFM, Mikael Gabra Santrio OFM, dan Valens Dulmin. **Bendahara:** Guido Ganggus OFM. **Sirkulasi:** Arief Rahman. **Lay Out:** Luga Bonaventura OFM.

Alamat Redaksi: JPIC OFM Indonesia, Jln. Letjend. Soeprapto, No. 80 Galur, RT.7/RW.4, Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10540. **HP (WA):** 081904101226. **Email:** gss_jpicofm@yahoo.com. **Website:** www.jpicofmindonesia.org.

Redaksi menerima artikel yang membahas tema keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tulisan dikirim melalui email dan akan diolah tanpa mengabaikan isi sebagaimana dimaksudkan penulis.

- DAFTAR ISI -

Pengantar Filsafat Politik (Yohanes Wahyu Prasetyo OFM) ... 2

Keadilan Karl Marx: Tilikan Rodney G. Peffer (Dr. Hieronimus Yoseph Dei Rupa OFM) ... 20

Leonardo Boff: Krisis Peradaban dan Etika Baru (Yohanes Wahyu Prasetyo OFM) ... 25

Kehidupan dalam Society 5.0: Dilema dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan (Dr. Cicilia Damayanti) ... 33

Makna Positif Kematian (Frumen Gions OFM) ... 47

Jalan Pertobatan St. Fransiskus Assisi (Rikard Selan OFM) ... 49

Johann Baptist Metz: Tangisan dan Mistisisme Penderitaan (Yohanes Wahyu Prasetyo OFM) ...

54

Kemampuan RAAT (Resilience, Attention, Adaptation, Transparency) untuk Menghadapi Era Teknologi Mesin Pintar (Dr. Cicilia Damayanti) ... 60

Tinjauan Buku "A Free and Fraternal Economy: The Franciscan Perspective" (Dr. Hieronimus Yoseph Dei Rupa OFM) ... 73

Tinjauan Buku "Krishnamurti 100 Years" (Dr. Budhy Munawar-Rachman) ... 76



MADAH PERSAUDARAAN SEMESTA

KEHIDUPAN POLITIK DALAM SOCIETY 5.0: DILEMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESETARAAN

Dr. Cicilia Damayanti

(Pengajar dan Konsultan Pendidikan)

Saat ini, dunia sedang mengalami era Society 5.0 yang ditandai dengan peran penting teknologi dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bidang politik. Teknologi mempengaruhi pembentukan opini publik, penyebaran informasi, dan pengambilan keputusan. Namun, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi juga membawa dampak negatif, seperti masalah perlindungan data dan hoaks.

Oleh karena itu, filsafat politik berperan penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan setara dalam era 5.0 yang terpusat pada teknologi. Artikel ini akan membahas persoalan yang terjadi dalam kehidupan politik dalam masyarakat 5.0 dan beberapa pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana filsafat politik dapat memastikan penggunaan teknologi tepat guna? Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan penggunaan teknologi agar tidak menyimpang dari manfaatnya? Bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diwujudkan dalam Society 5.0?

FILSAFAT POLITIK DI ERA SOCIETY 5.0

Society 5.0 pertama kali dicetuskan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016. Konsep Society 5.0 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memimpin perkembangan teknologi dan memastikan bahwa masyarakat Jepang siap menghadapi era yang lebih maju (Bali et al., 2022, p. 78; Ess, 2020; Nyholm, 2020, p. 123). Society 5.0 adalah sebuah konsep untuk menggambarkan tahap berikutnya dalam perkembangan masyarakat modern yang menggabungkan teknologi tinggi. Seperti kecerdasan buatan (AI) dan penggunaan internet, dengan budaya, nilai, dan praktik sosial yang mengarah pada kesejahteraan bagi semua orang (Bali et al.,

2022, p. 45; Chaurasia & Juang, 2022, p. 291; Laboratory, 2020, p. 90). Dalam hal ini, teknologi bukan hanya digunakan sebagai alat, tetapi juga sebagai bagian integral dari solusi masalah dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Society 5.0 merupakan visi masa depan di mana terdiri dari komunitas masyarakat yang sangat 'fasih' dalam teknologi.

Berikut akan dijelaskan pembabakan masyarakat dari era 1.0 hingga era 5.0 (Kanbara et al., 2022, p. 188): 1.0 Masyarakat berburu dan mengumpulkan: masyarakat ini hidup pada zaman prasejarah dan bergantung pada berburu, mengumpulkan, dan memancing sebagai sumber makanan mereka. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan belum mengenal pertanian.

2.0 Masyarakat pertanian: masyarakat ini hidup pada zaman peralihan dari kehidupan berburu dan mengumpulkan menjadi kehidupan bercocok tanam. Mereka hidup dalam kelompok yang lebih besar dan mengenal konsep kepemilikan lahan. Masyarakat ini juga mengembangkan alat-alat sederhana seperti arit dan sabit.

3.0 Masyarakat industri: masyarakat ini hidup pada zaman revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19. Mereka hidup di kota-kota dan bekerja di pabrik-pabrik. Perkembangan teknologi dan transportasi memungkinkan produksi massal dan perdagangan yang lebih efisien.

4.0 Masyarakat informasi: masyarakat ini hidup pada zaman digital di mana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Masyarakat ini memiliki akses ke internet dan berbagai sumber informasi. Mereka mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kemampuan untuk bekerja dari jarak jauh.

5.0 Masyarakat kognitif: masyarakat ini merupakan era di mana kecerdasan buatan (AI) dan teknologi canggih lainnya mulai mengambil alih beberapa tugas manusia. Masyarakat ini sangat tergantung pada teknologi dan memiliki akses ke sumber daya yang tak terbatas melalui internet. Mereka juga memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbedaan utama antara Society 5.0 dan Society 4.0 adalah adanya integrasi yang lebih erat antara teknologi digital dan kehidupan sehari-hari, serta dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut terhadap masyarakat. Dalam Society 5.0, isu-isu seperti privasi, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan hak asasi manusia menjadi lebih penting dan perlu diperhatikan. Oleh karena itu, filsafat politik dan etika teknologi memegang peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi digunakan untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga.

Pada era 5.0 diyakini setiap rumah akan terhubung dengan *internet of things* (IoT) dan mesin pintar, yang sudah menjadi bagian dari hidup setiap orang. IoT adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara perangkat *internet-enabled* dan perangkat fisik, sebagai contoh konkret seperti CCTV, alarm, kulkas, televisi dan benda sehari-hari yang terhubung dengan koneksi internet sehingga mampu berkomunikasi, bertukar data dan dikendalikan lewat ponsel (Evans, 2020, p. 37; Misa, 2022; Ramadhani et al., 2023, p. 23). Hubungan antar perangkat ini ditengarai mampu saling berkomunikasi dan bertukar data. Hal ini menyebabkan perangkat tersebut dapat dikendalikan dan dimonitor secara jarak jauh melalui jaringan internet.

Di sini tantangan besar di mulai. Setiap orang pada era 5.0 dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas hidupnya dengan mampu bekerja sama secara global agar keberlangsungan hidup di bumi dapat dipertahankan. Dengan bekerja sama, setiap orang dapat membagi tugas dan tanggung

jawab. Seperti menggabungkan ide dan sumber daya yang berbeda, serta memperkuat hasil akhir dari proyek besar bersama, yakni mewujudkan keadilan dan kesetaraan.

Society 5.0 diharapkan dapat mengadopsi nilai-nilai yang mengacu pada kebebasan orang, kesetaraan, dan penegakan hukum. Dalam konteks ini filsafat politik, yakni cabang ilmu filsafat yang membahas tentang asas-asas dan tujuan dari pemerintahan dan politik, memainkan peran penting karena dapat membantu memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan Society 5.0 (Borges & Sorge, 2022, p. 236). Filsafat politik menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam Society 5.0.

Society 5.0 diharapkan dapat menjadi perluasan dari sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menghargai harkat dan martabat, serta menjamin kebebasan setiap manusia sebagai hal yang sangat penting. Demokrasi liberal menjadi pilihan yang tepat karena sistem ini lebih menekankan pada hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Dalam demokrasi liberal, hak-hak setiap orang dilindungi melalui undang-undang dan pemerintah dipilih melalui pemilu yang demokratis (Boix, 2019, p. 207; Brighenti, 2022, p. 22; Melenovsky, 2022, p. 245; Visvizi & Lytras, 2019, p. 284). Meskipun sistem demokrasi liberal tidak sempurna, tetapi dapat memberikan landasan kuat untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan maju.

Untuk menghadapi tantangan di era 5.0, setiap masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam kehidupan berpolitik. Setiap orang diharapkan aktif berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik dan mengikuti proses politik yang sedang berlangsung di negaranya. Seperti mengetahui dan memahami isu-isu politik yang sedang terjadi, serta ikut memberikan suara pada pemilu atau referendum (Housley et al., 2022, pp. 407–410). Berpolitik aktif sangat penting bagi setiap orang di era 5.0 untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi dan industri berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan

masyarakat. Mereka juga memiliki pengaruh dan kendali atas lingkungan hidupnya. Setiap orang dalam Society 5.0 diharapkan semakin cerdas dalam memilih pemimpin yang mampu bekerja secara profesional untuk menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui teknologi yang dimanfaatkan dengan baik, hal tersebut dapat terwujud.

Kecepatan perkembangan teknologi ditengarai menjadi tantangan untuk mewujudkan hal tersebut. Sistem algoritma dalam pengambilan keputusan, contohnya, dapat menghasilkan keputusan yang bias dan melumpuhkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di samping itu keamanan data pengguna internet semakin sulit dijaga karena penggunaan teknologi yang kian masif, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah.

PERMASALAHAN DALAM SOCIETY 5.0

Keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang adalah persoalan klasik yang masih dihadapi hingga saat ini. Keadilan adalah konsep yang berfokus pada distribusi yang adil dari hak dan kewajiban dalam masyarakat (Ghonge et al., 2022, p. 124; Kanbara et al., 2022, p. 147). Dalam pemahaman filsafat, seperti yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap orang dalam masyarakat menerima perlakuan setara dan sama berdasarkan hukum dan norma-norma yang berlaku (Berrisford & Quinn, 2017, p. 67; Khoo & Sterken, 2021, p. 86). Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Di samping itu juga untuk memastikan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan mendapat hak yang sama.

Pada era Society 5.0 yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan digitalisasi, peran filsafat politik menjadi sangat penting (Khoo & Sterken, 2021, p. 156). Filsafat politik membantu setiap orang untuk memahami dan mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat yang sedang berkembang saat ini. Dalam Society 5.0, teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan

politik, termasuk bagaimana upaya pemerintahan dalam mengatur masyarakat. Setiap orang diharapkan untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, sehingga dapat membentuk pandangan yang mempengaruhi opini publik.

Filsafat politik membantu memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan politik dan bagaimana konsep-konsep seperti keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan dalam Society 5.0 (Visvizi & Lytras, 2019, p. 43). Filsafat politik juga membantu menentukan apakah sistem politik yang ada masih sesuai dengan era teknologi saat ini atau perlu diterapkan perubahan. Oleh karena itu, filsafat politik memegang peran penting dalam membantu mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam Society 5.0.

Namun, tidak hanya filsafat politik saja yang perlu dipertimbangkan. Dalam Society 5.0, teknologi juga memiliki implikasi terhadap permasalahan baru seperti perlindungan data pribadi dan masalah hoaks (Cover et al., 2022, p. 77). Oleh karena itu, filsafat politik perlu bekerja sama dengan disiplin ilmu lain seperti teknologi informasi dan ilmu komunikasi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

PERAN FILSAFAT POLITIK DALAM SOCIETY 5.0

Filsafat politik memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik dan pemanfaatan teknologi dalam hidup bersama (Christmas, 2021, p. 92; Khoo & Sterken, 2021, p. 234). Dalam era Society 5.0, filsafat politik memiliki peran yang lebih penting dan kompleks untuk menentukan arah dan tata kelola masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pertama, filsafat politik membantu dalam memformulasikan pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pada era Society 5.0, teknologi digital mempermudah akses informasi dan memperluas ruang diskusi publik. Oleh karena itu, filsafat politik memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu hukum dan keadilan.

Terutama yang terkait dengan teknologi, seperti hak privasi, perlindungan data, dan hak-hak asasi manusia (Borges & Sorge, 2022, p. 96; Erickson & Le Chevallier, 2018, p. 120).

Kedua, filsafat politik juga membantu menentukan bagaimana pemerintah harus bertindak dan berkoordinasi dengan industri teknologi untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terlindungi (Timcke, 2021, p. 136). Dalam era Society 5.0, filsafat politik membantu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat demokrasi dan memberikan akses yang sama bagi semua orang, bukan hanya kelompok tertentu.

Ketiga, filsafat politik juga membantu mengatasi masalah perlindungan data yang sangat penting dalam era Society 5.0. Dalam era yang sangat tergantung pada teknologi, filsafat politik memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan tidak dikompromikan oleh kelompok tertentu atau pemerintah (Choudhury et al., 2022, p. 157). Filsafat politik juga membantu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memerangi hoaks dan mempromosikan informasi yang benar dan akurat.

Dengan memahami filsafat politik, pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi digital digunakan untuk memperkuat keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Di samping itu dibutuhkan akses informasi yang mudah dan cepat. Teknologi dapat membantu Society 5.0 mengakses informasi dan berpartisipasi dalam politik dengan lebih mudah (Hartley et al., 2021, p. 131). Akses ke media sosial, ruang diskusi, dan aplikasi pemantau politik dapat membantu masyarakat untuk memahami isu-isu politik dan membuat suara mereka didengar. Teknologi juga dapat membantu Society 5.0 untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Seperti membuat petisi dan mempengaruhi kebijakan publik melalui survei dan media online.

Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa

masyarakat memiliki akses yang adil dan transparan ke informasi dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan sesi-sesi tanya jawab dan diskusi publik mengenai kebijakan-kebijakan penting.

Di Indonesia, pemerintah sedang berupaya untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dalam upaya membangun Society 5.0. Peran pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Society 5.0 yang adil dan setara sangat penting. Pada era yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dan tidak merugikan masyarakat (Qushoyyi, 2021; Yasa1 et al., 2021). Salah satu contoh peran pemerintah Indonesia adalah melalui penerapan sistem teknologi yang bertujuan untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah Indonesia juga sedang bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusianya untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Dalam hal keamanan data, pemerintah dapat mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi hak privasi dan memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan berdasarkan data faktual dan sudah teruji kebenarannya. Pemerintah juga sedang berupaya untuk memperkuat institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan politik. Pemerintah juga sedang bekerja sama dengan berbagai lembaga dan perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa teknologi dipakai dengan bijak dan memperkuat peran demokrasi dan hak asasi manusia (Area, 2022; Sudarno, 2022). Misalnya, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memerangi hoaks dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi yang benar dan akurat.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN POLITIK SOCIETY 5.0

Bentuk pemerintahan yang dibutuhkan Society 5.0 adalah pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan memperhatikan hak asasi manusia serta lingkungan. Pemerintahan yang mampu mengintegrasikan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan publik, serta memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Di samping itu mereka dituntut untuk dapat bersifat inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu. Pemerintah dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan secara adil dan berkesinambungan.

Pemerintah dapat bekerjasama dengan teknologi dengan cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan (Herian, 2018, p. 56; Shakya, 2017, p. 78). Mereka juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan memastikan adanya distribusi informasi yang adil dan merata. Contohnya dengan menyediakan layanan *e-government* untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah.

Permasalahan perlindungan data adalah salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam era digital. Dalam Society 5.0, data pribadi setiap orang sangat mudah untuk didapatkan dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Ramadhani et al., 2023, p. 402). Hal ini berpotensi membahayakan hak-hak pribadi dan privasi setiap orang. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dan standar yang jelas untuk melindungi data pribadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan informasi yang tidak benar, atau yang dikenal dengan istilah hoaks, juga menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya dalam Society 5.0. Kehadiran teknologi membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan mudah. Namun, hal

ini juga mempermudah penyebaran informasi yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Hoaks dapat mempengaruhi opini publik dan memperburuk situasi politik (Cover et al., 2022, p. 45). Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan pendidikan untuk mengatasi masalah hoaks dan memastikan bahwa informasi yang didapatkan benar dan dapat dipercaya.

Dalam mengatasi permasalahan perlindungan data dan hoaks, filsafat politik memegang peran yang sangat penting. Filsafat politik membantu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Filsafat politik juga membantu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam Society 5.0, seperti permasalahan perlindungan data dan hoaks (Housley et al., 2022, p. 56). Oleh karena itu, peran filsafat politik sangat penting dalam memastikan bahwa teknologi digunakan dengan baik dan benar dalam kehidupan politik Society 5.0.

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan politik Society 5.0. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam proses pembuatan kebijakan adalah teknologi yang membuat file (*ledger digital*) yang saling terhubung (terdistribusi) dan transparan. Blockchain adalah teknologi yang menyediakan sistem terdistribusi untuk mencatat transaksi dan memverifikasi identitas global. Sistem dalam blockchain menggunakan algoritma enkripsi untuk membuat catatan yang tidak dapat diubah dan saling terhubung dalam rantai blok. Setiap blok berisi informasi tentang transaksi. Setiap transaksi ini harus dikonfirmasi oleh jaringan sebelum ditambahkan ke blockchain. Tindakan ini yang menyebabkan blockchain aman dan tidak dapat dimanipulasi (Herian, 2018, pp. 81–82; Reddick et al., 2021, p. 125). Setiap transaksi dalam jaringan blockchain tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah atau dihapus. Tindakan ini untuk memastikan integritas suatu data.

Blockchain bekerja dengan menyimpan data dalam blok-blok yang terikat satu sama lain melalui tautan kriptografi. Setiap blok berisi sejumlah informasi, seperti transaksi, dan diakhiri dengan sebuah *hash* unik yang mengacu pada *hash* blok sebelumnya. Gambaran ini membuat blockchain seperti rantai, di mana setiap blok memiliki tautan ke blok sebelumnya dan setelahnya (Bashir, 2020, pp. 1–7; Drescher, 2017, pp. 9–13; Krishnan et al., 2021, p. 28).

Informasi dalam blockchain terdesentralisasi, sehingga setiap partisipan dalam jaringan memiliki salinan lengkap dari database. Hal ini membuat jaringan sangat resisten terhadap perubahan data yang tidak sah, karena memodifikasi satu salinan akan membutuhkan pemodifikasian pada semua salinan yang ada dalam jaringan. Untuk menambahkan informasi baru ke blockchain, sebuah transaksi harus dikonfirmasi oleh jaringan melalui proses yang dikenal sebagai “consensus” (Borges & Sorge, 2022, p. 341). Tindakan ini untuk memastikan bahwa semua partisipan dalam jaringan setuju bahwa transaksi yang baru ditambahkan valid dan benar.

Dalam Society 5.0, blockchain memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam melindungi data masyarakat dan mengatasi permasalahan hoaks. Blockchain menyediakan metode yang aman dan transparan untuk mencatat dan menyimpan informasi digital (Krishnan et al., 2021, p. 97). Karena tidak ada satu entitas yang memiliki kendali atas jaringan, maka data yang dicatat di dalam blockchain sulit untuk dicabut atau dimodifikasi. Sistem ini membuat blockchain sangat baik untuk melindungi data sensitif, seperti informasi pribadi, transaksi keuangan, dan lain-lain. Blockchain juga memungkinkan penciptaan sistem yang memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat adalah akurat dan terverifikasi (Pollicino & De Gregorio, 2021, p. 88). Dengan demikian, blockchain dapat membantu meminimalisasi masalah hoaks dalam Society 5.0.

Beberapa negara sudah mulai mengevaluasi penggunaan blockchain untuk memastikan

keabsahan pemilu. Sistem ini memastikan bahwa suara yang diterima adalah valid dan akurat, serta membantu menghilangkan masalah manipulasi suara. Di Indonesia, beberapa organisasi swasta dan pemerintah juga mulai mengevaluasi penggunaan blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam pemilihan umum (Maureen et al., 2022, p. 45; Ramadhani et al., 2023, p. 113).

Blockchain adalah teknologi yang dipilih untuk menciptakan kestabilan politik karena memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat cocok digunakan dalam pemilihan umum maupun pembuatan kebijakan publik (Reddick et al., 2021, pp. 145–148). Sebagai teknologi terdesentralisasi, blockchain memungkinkan penyimpanan data pemilih yang terdesentralisasi dalam sistem pemilihan umum, sehingga informasi tidak terpusat pada satu entitas atau server, melainkan dibagikan secara merata ke semua partisipan dalam jaringan.

Keuntungan lainnya dari blockchain adalah partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik dengan memberikan masukan dan pendapat mereka dengan mudah dan efisien melalui jaringan blockchain (Juho Lindman, Jamie Berryhill, 2020, p. 145). Keamanan data juga terjaga karena blockchain menggunakan teknologi kriptografi yang membuat informasi dalam blockchain tidak dapat dimodifikasi tanpa adanya konsensus dari semua partisipan dalam jaringan, sehingga membuat sistem pemilihan lebih aman dan terlindungi dari manipulasi.

Blockchain juga memberikan transparansi dalam proses pemilihan karena setiap pemilih dapat melacak hasil pemilihan mereka melalui jaringan blockchain saat pemilu berlangsung (Krishnan et al., 2021, p. 98). Hal ini memastikan bahwa hasil pemilihan benar dan sah. Meskipun informasi pemilih dapat dicatat dan ditracking dalam blockchain, identitas pemilih tetap rahasia karena mereka dienkripsi dan tidak terkait dengan identitas nyata mereka.

Kecepatan dan efisiensi dalam proses pemilihan juga meningkat karena blockchain mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan hasil dalam sistem pemilu (Pollicino & De Gregorio, 2021, p. 93). Hal ini membuat proses pemilihan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode tradisional. Di samping itu, blockchain juga membuat proses pengambilan kebijakan publik lebih dapat dipertanggungjawabkan karena setiap transaksi dan interaksi yang terjadi dalam jaringan dapat dilacak dan dianalisis. Dalam hal ini penggunaan blockchain dapat menciptakan kestabilan politik. Teknologi ini memastikan bahwa pemilihan umum maupun pengambilan kebijakan publik memperhitungkan pandangan dan kepentingan semua pihak, sehingga membuat prosesnya berjalan lebih adil dan merata.

Meskipun belum ada penerapan blockchain yang sepenuhnya dalam menciptakan kestabilan politik dalam Society 5.0, beberapa negara dan organisasi sedang mengevaluasi potensi teknologi ini untuk memfasilitasi proses pemilu dan pengambilan kebijakan publik. Pemilu presiden West Virginia pada tahun 2018 menjadi contoh nyata penggunaan blockchain (Krishnan et al., 2021; Pollicino & De Gregorio, 2021; Reddick et al., 2021, p. 99). Dimana teknologi blockchain digunakan untuk memvalidasi suara-suara yang diterima dari warga yang berada jauh dari tempat pemungutan suara. Hal ini membuat proses pemilu lebih mudah dan efisien serta memastikan hasil pemungutan suara dapat dipercaya.

Di samping itu, blockchain dapat membantu dalam mengimplementasikan transparansi dan integritas dalam proses pembuatan kebijakan publik. Blockchain akan menyediakan jaringan yang tidak dapat dimanipulasi dan dapat mencatat setiap tindakan dalam jaringan. Teknologi ini dapat memastikan bahwa informasi yang tercatat adalah akurat dan transparan. Selain itu, blockchain juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memungkinkan pemantauan publik dan memastikan bahwa suara masing-masing orang diakui dan diperhitungkan. Berikut

beberapa contoh penggunaan blockchain (Rocha et al., 2021; Vyas et al., 2022, p. 143):

1. *Piloting Pemilu Berbasis Blockchain*: beberapa negara sedang mengevaluasi potensi penggunaan blockchain untuk memastikan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Misalnya, pada pemilu presiden Rusia tahun 2018, sebuah sistem pemilu berbasis blockchain didemonstrasikan untuk memastikan bahwa hasil pemilu tidak dapat dicurangi.

2. *Pengumpulan Suara Berbasis Blockchain*: beberapa organisasi sedang mengevaluasi penggunaan blockchain untuk memastikan bahwa suara dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat dicatat dan dilacak dengan transparan. Misalnya, sebuah organisasi non-pemerintah di Selandia Baru sedang mengevaluasi penggunaan blockchain untuk memastikan bahwa suara warga dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat dicatat dan dilacak dengan transparan.

3. *Sistem Pendistribusian Bantuan Sosial Berbasis Blockchain*: beberapa negara sedang mengevaluasi penggunaan blockchain untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh mereka yang membutuhkan. Misalnya, pemerintah Afrika Selatan sedang mengevaluasi penggunaan blockchain untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh mereka yang membutuhkan dan untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial tidak dicurangi.

Untuk akses blockchain, masyarakat bisa melakukan beberapa hal seperti menggunakan dompet digital untuk membuat transaksi dan menyimpan aset digital, menjadi bagian dari blok-blok pada jaringan blockchain, atau berpartisipasi dalam proyek-proyek blockchain dengan membeli token atau koin digital. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi atau platform yang memanfaatkan teknologi blockchain, seperti aplikasi pembayaran atau sistem voting online. Untuk lebih memahami teknologi blockchain, masyarakat juga bisa membaca, berdiskusi,

atau mengikuti pelatihan (Rossiter & Zehle, 2022; Vyas et al., 2022, p. 151):

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kestabilan politik dalam Society 5.0. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan transparan ke informasi dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Contohnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara dalam pemilu atau referendum dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel (Vyas et al., 2022, p. 158). Hal ini untuk memastikan bahwa hasil pemungutan suara dapat dipercaya dan tidak dapat dipalsukan, sehingga memastikan kestabilan politik dalam masyarakat.

Teknologi lain seperti media sosial dan aplikasi *chatting* dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan diskusi publik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui teknologi tersebut, dapat dipastikan bahwa masyarakat memiliki waktu dan ruang untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka mengenai masalah penting. Mereka juga dapat memastikan bahwa pemerintah memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat kebijakan untuk kesejahteraan hidup bersama.

Dengan memanfaatkan blockchain, masyarakat dapat memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah adil, transparan, dan akuntabel. Blockchain dapat membantu masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama, dan juga memastikan bahwa keberlangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi blockchain masih baru dan sedang berkembang, sehingga memerlukan pemahaman dan pelatihan yang lebih dalam.

Pemerintah punya tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara ketika penggunaan teknologi blockchain semakin meluas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga situasi ini, di antaranya: (Krishnan et

al., 2021, pp. 121–125): (1) Membuat regulasi yang jelas mengenai penggunaan blockchain, seperti aturan keamanan dan privasi, agar informasi penting tidak mudah bocor atau rusak. (2) Meningkatkan pendidikan mengenai blockchain dan teknologi terkait, sehingga masyarakat bisa lebih memahami cara kerjanya dan risiko yang ada. (3) Memonitor penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan bahwa penggunaannya benar dan tidak membahayakan kedaulatan dan keamanan negara. (4) Membangun kerja sama dengan pemerintah negara lain untuk memastikan bahwa penggunaan blockchain dilakukan dengan aman dan tidak merugikan negara. (5) Memastikan investasi dalam teknologi blockchain digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara serta tidak membahayakan negara. (6) Menerapkan standar keamanan dan privasi dalam setiap aplikasi blockchain, sehingga informasi tetap aman dan terjaga. Pemerintah diharapkan dapat bertindak proaktif dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan blockchain tidak merugikan kedaulatan dan keamanan negara.

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan berbagai cara, termasuk dalam pembuatan kebijakan. Dalam era 5.0, sistem algoritma telah menjadi bagian penting dari proses pembuatan kebijakan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil yang diperoleh (Rossiter & Zehle, 2022, p. 110). Namun, jika sistem algoritma tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Hal ini dapat terjadi karena data yang digunakan untuk membentuk algoritma dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, atau kebiasaan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem algoritma dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, dan harus menggunakan data yang berkualitas dan tidak diskriminatif. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem algoritma tidak memberikan keuntungan kepada

sekelompok tertentu dalam masyarakat dan memperlakukan semua orang secara adil dan merata (Timcke, 2021, p. 91). Dengan demikian, perkembangan teknologi digunakan dengan cara yang bijaksana dan memperlakukan semua orang dengan adil dan merata. Semua teknologi tersebut harus dipakai dengan bijak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mewujudkan Society 5.0 yang adil dan sejahtera.

BENTUK KESETARAAN SOCIETY 5.0: METAMODERNISME

Dengan memberikan gambaran yang lebih holistik dan lengkap, metamodernisme dapat membantu Society 5.0 dalam mengelola kehidupan politik di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Metamodernisme mengakui bahwa semua ideologi dan filosofi masa lalu, termasuk postmodernisme, memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dievaluasi.

Metamodernisme adalah gagasan filsafat, seni, dan budaya yang memadukan aspek-aspek dari modernisme, postmodernisme, dan periode lainnya untuk memberikan sudut pandang baru terhadap ketidakpastian dan kompleksitas dunia saat ini. Metamodernisme sering dilihat sebagai gerakan atau tren seni modern yang muncul pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Gerakan ini menyatukan para seniman dan kreator dari berbagai genre, termasuk seni visual, sinema, musik, sastra, dan teater. Metamodernisme adalah tren pemikiran atau gerakan yang muncul di kalangan seniman, filsuf, dan budayawan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, dan bukan sebuah teori yang dibentuk oleh satu individu atau kelompok. Tokoh-tokoh metamodernisme antara lain Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker, dan Peter Benson (Glăveanu, 2023; Hanzi Freinacht, 2017, p. 469).

Timotheus Vermeulen dan Robin van den Akker, dua cendekiawan Belanda, menerbitkan "Notes on Metamodernism" di majalah budaya *E-flux* pada tahun 2010. Artikel tersebut mengajukan konsep metamodernisme sebagai tandingan dari

postmodernisme yang sebelumnya mendominasi seni, sastra, dan masyarakat. Vermeulen dan van den Akker mendefinisikan metamodernisme sebagai sebuah gerakan yang berusaha menyatukan karakteristik modernisme dan postmodernisme. Mereka berpendapat bahwa metamodernisme tidak hanya "mengikuti" atau "menentang" modernisme dan posmodernisme, tetapi juga mencari titik tengah di antara keduanya (Van den Akker et al., 2017, p. 23).

Gagasan tentang ikatan ganda dapat dipakai untuk memahami konteks metamodernisme. Ikatan ganda merupakan keadaan ketegangan antara dua keinginan yang berlawanan yang tidak mungkin dipisahkan. Gagasan ini menyinggung pengalaman manusia dalam menghadapi realitas yang rumit dan berbeda, di mana seseorang sering kali terjebak dalam skenario di mana ia harus memilih di antara dua kemungkinan yang sulit dibedakan. Dalam psikologi, ikatan ganda adalah suatu keadaan di mana seseorang terjebak dalam situasi konflik yang rumit dan terkadang saling bertentangan, sehingga sulit untuk memilih tindakan yang terbaik (Hanzi Freinacht, 2017, p. 36). Contoh keledai dan wortel adalah salah satu gambaran yang sering digunakan untuk menunjukkan gagasan ikatan ganda.

Seseorang dalam skenario ini ingin mengangkut keledai dari titik A ke titik B. Namun, keledai tersebut menolak untuk bergerak. Seseorang menggantung wortel di depan keledai untuk memancingnya agar mau bergerak. Namun, keledai itu sulit bergerak maju karena wortel itu terus menjauh darinya.

Keledai berada dalam ikatan ganda dalam kondisi ini, yang merupakan skenario konflik di mana ia ingin memenuhi dua permintaan yang bersaing: ia ingin maju menuju wortel (permintaan pertama), tetapi ia juga ingin tetap tinggal karena wortel tidak pernah dekat (permintaan kedua). Ikatan ganda ini membingungkan keledai, membuatnya sulit untuk memilih tindakan terbaik. Metamodernisme mengakui bahwa manusia hidup dalam lingkungan yang kompleks dan

beragam di mana mereka harus menghadapi fakta-fakta yang tidak selalu sederhana dan mudah dipahami. Dalam konteks ini, gagasan ikatan ganda dalam metamodernisme menjelaskan posisi manusia yang sering kali dipaksa untuk memilih di antara dua kemungkinan yang kontradiktif sekaligus harus menganalisis kedua pilihan tersebut.

Dalam politik, misalnya, seseorang mungkin harus memilih antara menjunjung tinggi prinsip-prinsip tradisional dan menerima perubahan dan kemajuan yang progresif (Hameleers, 2021; Hanzi freinacht, 2019, p. 493). Pada skenario ini, metamodernisme menyarankan agar setiap orang mengakui dan mengevaluasi kedua pilihan tersebut dengan cara yang lebih bermakna dan menyeluruh, dan kemudian berusaha untuk menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Situasi ikatan ganda dalam metamodernisme dapat membantu orang memahami dan mengatasi kondisi konflik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang kompleks dan beragam.

Sudut pandang metamodernisme yang lebih inklusif dan beragam, menunjukkan bagaimana setiap orang hidup di dunia yang rumit, penuh dengan paradoks, dan kontradiksi. Kebenaran dan keindahan, menurut metamodernisme, tidak lagi bersifat absolut atau universal, namun lebih bersifat variabel dan bergantung pada konteks dan pengalaman individu. Dengan menghadirkan visi yang lebih holistik dan utuh, gagasan metamodernisme dapat memampukan Society 5.0 mengarungi kehidupan politik di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat. Dalam metamodernisme, terdapat kesadaran bahwa semua ideologi dan sistem yang pernah ada, termasuk postmodernisme, memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dievaluasi.

Konsep metamodernisme menggambarkan perubahan yang dinamis, kompleks, dan terbuka terhadap pengaruh eksternal. Melalui gambaran ini dapat membantu setiap orang di era 5.0 untuk menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya yang cepat dan kompleks.

Nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, dan toleransi menjadi sarana untuk mewujudkan Society 5.0 yang lebih inklusif dan mandiri (Storm, 2021, p. 124; Wästerfors, 2023). Pendekatan metamodernisme dapat dipakai untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam Society 5.0 dengan mendorong prinsip-prinsip seperti kerja sama, inklusivitas, dan keterbukaan. Kerja sama antara pribadi dan kelompok yang beragam, baik lokal maupun global, dapat menghasilkan perkembangan masyarakat yang positif. Inklusi dan keterbukaan dapat membantu menjembatani kesenjangan sosial, sehingga setiap orang merasa diakui dan memiliki akses yang sama.

Dalam konteks politik, gagasan metamodernisme dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Para pemimpin politik dapat membuat penilaian yang lebih cerdas dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dan menggabungkan berbagai perspektif. Selain itu, cita-cita metamodernis seperti refleksi diri dan keberanian untuk berubah dapat membantu setiap orang untuk mengevaluasi keyakinan dan perilakunya agar menjadi lebih baik dan produktif.

Masyarakat di era 5.0 dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif, inventif, dan berkelanjutan dengan menggunakan gagasan metamodernisme. Keadilan dan kesetaraan dapat dicapai ketika nilai-nilai metamodernisme menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, seperti (Bowle, J. Edward and Arneson, 2023; Storm, 2021, pp. 137–139): (1) Keterbukaan: Karakteristik ini menyoroti perlunya keterbukaan terhadap perspektif dan pengalaman baru, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. (2) Kritis: Karakteristik ini menyoroti perlunya kemampuan untuk mempertanyakan dan menyelidiki realitas dari sebuah pernyataan, serta memiliki sikap kritis terhadap informasi dan gagasan yang diterima. (3) Kemanusiaan: Nilai ini menyoroti pentingnya menjaga cita-cita kemanusiaan,

persatuan, dan kepedulian terhadap sesama.
(4) Kolaborasi: Nilai ini menyoroti pentingnya bermitra dengan orang lain untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan.
(5) Tanggung jawab: Nilai ini menyoroti pentingnya menerima tanggung jawab atas tindakan dan keputusan seseorang, serta menyadari dampak dari tindakan tersebut.

Setiap orang dalam Society 5.0 dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatasi kesulitan politik yang rumit dan berubah dengan cepat dalam periode metamodernisme dengan mengadopsi nilai-nilai ini. Mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, menganalisis dan mengelola informasi secara kritis, serta berkolaborasi dengan orang lain untuk memecahkan tantangan yang kompleks dan saling terkait. Selain itu, cita-cita kemanusiaan dan tanggung jawab menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas politik yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan publik dan kebaikan bersama.

PENUTUP

Teknologi telah membantu memperluas akses informasi dan membuatnya lebih mudah bagi orang untuk terlibat dalam politik. Teknologi memiliki potensi untuk memberikan solusi untuk berbagai permasalahan politik, tetapi juga memiliki potensi untuk memperparah masalah tersebut. Tergantung pada bagaimana teknologi digunakan dan bagaimana pemerintah dan masyarakat memahami dan mengatur teknologi, teknologi dapat membantu memperbaiki demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan politik yang baik diterapkan, atau dapat memperparah masalah seperti diskriminasi dan pemerkosaan privasi.

Pada gilirannya, solusi untuk permasalahan teknologi dan politik akan tergantung pada tindakan yang diambil oleh pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijaksana dan bahwa tindakan diambil untuk memastikan bahwa teknologi tidak merugikan hak-hak dan nilai-nilai fundamental manusia. Solusi juga dapat melibatkan pendidikan dan keterbukaan

tentang teknologi dan bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan politik, serta tindakan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan publik.

Di era Society 5.0 yang semakin maju, teknologi semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi teknologi dengan bijak dan cerdas. Salah satu cara untuk menghadapi teknologi adalah dengan menjadi pembelajar yang terus-menerus. Dengan terus memperbarui pengetahuan, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan memahami dampak yang mungkin terjadi.

Selain itu, setiap orang harus menjadi pengguna teknologi yang bijak. Hal ini berarti memastikan bahwa setiap orang menggunakan teknologi dengan etika dan memahami privasi masing-masing. Setiap orang juga harus menghindari terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain. Tidak kalah pentingnya, hak-hak digital setiap orang harus diperjuangkan. Hak-hak tersebut meliputi hak atas privasi dan hak untuk memiliki akses yang sama ke teknologi dan informasi. Setiap orang sebaiknya berpartisipasi dalam politik teknologi dengan mengikuti diskusi tentang kebijakan teknologi. Dengan cara tersebut suara setiap orang dapat didengar dalam pembuatan kebijakan teknologi. Hal yang paling penting adalah untuk menjadi orang dengan pemikiran kritis. Pemikiran ini membuat setiap orang mempertimbangkan sumber daya dan informasi yang tersedia secara kritis untuk membuat keputusan yang bijak dan informatif.

Untuk memenuhi tuntutan era digital 5.0, politik pada era teknologi harus mengarah pada prinsip-prinsip inklusi, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan memastikan bahwa politik teknologi didasarkan pada prinsip-prinsip inklusi, transparansi, dan tanggung jawab, pemerintah dan industri teknologi dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi adalah bermanfaat bagi masyarakat

dan membantu membangun dunia yang lebih adil dan inklusif.

Teknologi memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi berbagai masalah politik dan sosial saat ini. Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, memperluas akses informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik. Namun, harus diingat bahwa teknologi sendiri tidak dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah politik. Pembuatan kebijakan dan regulasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Penggunaan teknologi harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab. Di samping itu harus memperhitungkan dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat dan lingkungan. Teknologi dapat memberikan solusi bagi perkembangan dan konteks politik saat ini, tetapi hanya jika digunakan dengan bijak dan didukung oleh kebijakan dan regulasi yang tepat. Setiap orang harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dan membantu membangun dunia yang lebih adil dan inklusif.

SUMBER BACAAN:

Area, T. U. M. (2022). *Hal yang Harus Disiapkan Indonesia dalam Memasuki Era Industri 5.0*. <https://bakai.uma.ac.id/2022/07/27/hal-yang-harus-disiapkan-indonesia-dalam-memasuki-era-industri-5-0/>

Bali, V., Bhatnagar, V., Sinha, S., & Johri, P. (2022). *Disruptive Technologies for Society 5.0: Exploration of New Ideas, Techniques, and Tools*. CRC Press. <https://books.google.co.id/books?id=xJfEAAAQBAJ>

Bashir, I. (2020). *Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more, 3rd Edition*. Packt Publishing.

Berrisford, K., & Quinn, R. (2017). *An Analysis of Aristotle's Politics*. Macat Library.

Boix, C. (2019). *Democratic Capitalism at the Crossroads: Technological Change and the Future of Politics*. Princeton University Press.

Borges, G., & Sorge, C. (2022). *Law and Technology in a Global Digital Society: Autonomous Systems, Big Data, IT Security and Legal Tech*. Springer International Publishing.

Bowle, J. Edward and Arneson, Richard J. (2023). Political Philosophy. *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/political-philosophy>

Brighenti, A. M. (2022). *The New Politics of Visibility: Spaces, Actors, Practices and Technologies in The Visible*. Intellect Books Limited.

Chaurasia, M. A., & Juang, C. F. (2022). *Emerging IT/ICT and AI Technologies Affecting Society*. Springer Nature Singapore.

Choudhury, A., Singh, T. P., Biswas, A., & Anand, M. (2022). *Evolution of Digitized Societies Through Advanced Technologies*. Springer Nature Singapore.

Christmas, B. (2021). *Property and Justice: A Liberal Theory of Natural Rights*. Taylor & Francis.

Cover, R., Haw, A., & Thompson, J. D. (2022). *Fake News in Digital Cultures: Technology, Populism and Digital Misinformation*. Emerald Publishing Limited.

Drescher, D. (2017). *Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps*. Apress.

Erickson, D., & Le Chevallier, M. (Eds.). (2018). *Jean Bethke Elshtain*. University of Notre Dame Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvpg84t4>

Ess, C. M. (2020). Interpretative Pros Hen Pluralism: from Computer-Mediated Colonization to a Pluralistic Intercultural Digital Ethics. *Philosophy & Technology*, 33 (4), 551–569. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00412-9>

- Evans, D. (2020). *The Internet of Intelligent Things: Your Guide to The Connected Future*. BOWKER IDENTIFIER SERV S.
- Ghonge, M. M., Pramanik, S., Mangrulkar, R., & Le, D. N. (2022). *Cyber Security and Digital Forensics: Challenges and Future Trends*. Wiley.
- Glăveanu, V. P. (2023). *The Palgrave Encyclopaedia of the Possible*. Springer International Publishing.
- Hameleers, M. (2021). *Populist Disinformation in Fragmented Information Settings: Understanding the Nature and Persuasiveness of Populist and Post-factual Communication*. Taylor & Francis.
- Hanzi freinacht. (2019). *Nordic Ideology: A Guide to Metamodern Politics, Book Two*. Metamoderna ApS.
- Hanzi Freinacht. (2017). *The Listening Society: A Guide to Metamodern Politics, Part One*. Metamoderna ApS.
- Hartley, J., Ibrus, I., & Ojamaa, M. (2021). *On the Digital Semiosphere: Culture, Media and Science for the Anthropocene*. New York.
- Herian, R. (2018). *Regulating Blockchain: Critical Perspectives in Law and Technology*. Taylor & Francis.
- Housley, W., Edwards, A., Beneito-Montagut, R., & Fitzgerald, R. (2022). *The SAGE Handbook of Digital Society*. SAGE Publications.
- Juho Lindman, Jamie Berryhill, B. W. and M. P.-B. (2020). The uncertain promise of blockchain for government. *OECD Working Papers on Public Governance*, 43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1787/d031cd67-en>
- Kanbara, S., Shaw, R., Kato, N., Miyazaki, H., & Morita, A. (2022). *Society 5.0, Digital Transformation and Disasters: Past, Present and Future*. Springer Nature Singapore.
- Khoo, J., & Sterken, R. K. (2021). *The Routledge Handbook of Social and Political Philosophy of Language*. Taylor & Francis.
- Krishnan, S., Balas, V. E., Golden, J., Robinson, Y. H., & Mishra, R. K. (2021). *Blockchain for Smart Cities*. Elsevier Science.
- Laboratory, H. U. T. (2020). *Society 5.0: A People-centric Super-smart Society*. Springer Nature Singapore.
- Maureen, I. Y., Imah, E. M., Savira, S. I., Anam, S., Mael, M. R., & Hartanti, L. (2022). *Innovation on Education and Social Sciences: Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2021) October 2, 2021, Surabaya, Indonesia*. CRC Press.
- Melenovsky, C. M. (2022). *The Routledge Handbook of Philosophy, Politics, and Economics*. Taylor & Francis.
- Misa, T. J. (2022). *Leonardo to the Internet: Technology and Culture from the Renaissance to the Present*. Johns Hopkins University Press.
- Nyholm, S. (2020). *Humans and Robots: Ethics, Agency, and Anthropomorphism*. Rowman & Littlefield Publishers.
<https://books.google.co.id/books?id=2pPTDwAAQBAJ>
- Pollicino, O., & De Gregorio, G. (2021). *Blockchain and Public Law: Global Challenges in the Era of Decentralisation*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Qushoyyi, R. R. (2021). *Memasuki Era Society 5.0 dan Persiapan SDM Indonesia Menghadapi Digital Society* Konten ini telah tayang di *Kompasiana.com* dengan judul “Memasuki Era Society 5.0 dan Persiapan SDM Indonesia Menghadapi Digital Society”, Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/rriorohmi/606e6fae8ede4847cb29b3f2/memasuki-era-society-5-0-dan-persiapan-sdm-indonesia-menghadapi-digital-society>

Ramadhani, D. P., Rachmawati, I., Dudija, N., Ayuningtias, H. G., Gunawan, A. A., & Dennyra, D. S. (2023). *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0: Proceedings of the International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Information and Innovation (SCBTII 2021), Bandung, Indonesia, 28 July 2021*. CRC Press.

Reddick, C. G., Rodríguez-Bolívar, M. P., & Scholl, H. J. (2021). *Blockchain and the Public Sector: Theories, Reforms, and Case Studies*. Springer International Publishing.

Rocha, Á., López-López, P. C., & Salgado-Guerrero, J. P. (2021). *Communication, Smart Technologies and Innovation for Society: Proceedings of CITIS 2021*. Springer Singapore. <https://books.google.co.id/books?id=7kZFEEAAQBAJ>

Rossiter, N., & Zehle, S. (2022). Platform Politics and a World Beyond Catastrophe. In E. Armano, M. Briziarelli, & E. Risi (Eds.), *Digital Platforms and Algorithmic Subjectivities* (Vol. 24, pp. 33–46). University of Westminster Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv319wpvm.6>

Shakya, R. K. (2017). *Digital Governance and E-Government Principles Applied to Public Procurement*. IGI Global.

Storm, J. A. J. (2021). *Metamodernism: The Future of Theory*. University of Chicago Press.

Sudarno, N. A. (2022). *Apakah Indonesia telah Siap Menyongsong Era Society 5.0?* <https://bandungbergerak.id/article/detail/2017/apakah-indonesia-telah-siap-menyongsong-era-society-5-0>

Timcke, S. (2021). *Algorithms and the End of Politics: How Technology Shapes 21st-Century American Life*. Bristol University Press.

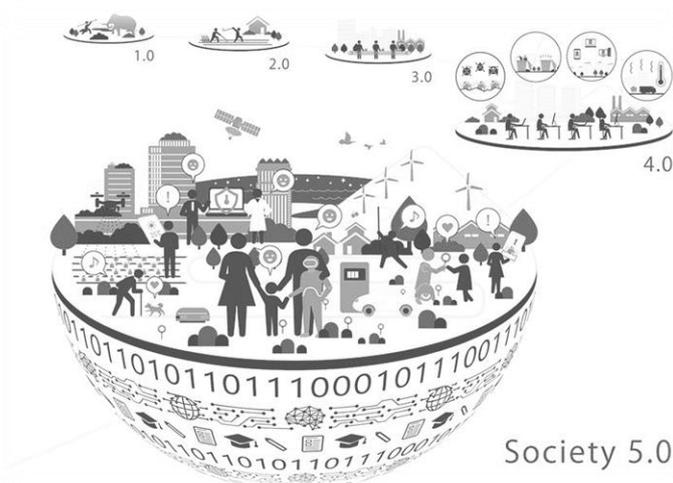
Van den Akker, R., Gibbons, A., & Vermeulen, T. (2017). *Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth After Postmodernism*. Rowman & Littlefield International.

Visvizi, A., & Lytras, M. D. (2019). *Politics and Technology in the Post-Truth Era*. Emerald Publishing Limited.

Vyas, S., Shukla, V. K., Gupta, S., & Prasad, A. (2022). *Blockchain Technology: Exploring Opportunities, Challenges, and Applications*. CRC Press.

Wästerfors, D. (2023). *Violence: Situation, Speciality, Politics, and Storytelling*. Taylor & Francis.

Yasa1, A., Suswanta2, Rafiz, M., Rahmanto4, F., Setiawan5, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20 (01), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip>



SUMBER GAMBAR:

https://www.japan.go.jp/kizuna/2022/06/integrated_innovation_strategy.html